

Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh

Oleh:

¹ Dela Ananda; ² Arkanudin; ³ Reiki Nauli Harahap; ⁴ Riska Nawila; ⁵ S Visi Ananda; ⁶ Stephanie Gloria Paskah Bertho

^{1,2,3,4,5,6}. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Tanjungpura

Email. e1021211092@student.untan.ac.id

Abstrak

Pengelolaan kawasan kumuh khususnya diperkotaan ialah salah satu unsur yang sangat penting dalam upaya pengelolaan, pembangunan, dan pelayanan publik. Faktor dominan yang terjadi dipermukiman wilayah kumuh, diantaranya: pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan kurangnya perencanaan kota yang efektif. Adapun tujuan studi ini guna mengevaluasi pelaksanaan program KOTAKU di Kota Pontianak. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif – kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa purposive sampling dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan evaluasi pelaksanaan program KOTAKU di Kota Pontianak ditinjau dari 7 indikator yang sudah dianalisis sudah termasuk dalam kategori kumuh sedang, dan sudah baik dalam partisipasi masyarakat hingga hubungan antar pihak - pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan program KOTAKU. Adapun program yang sudah berjalan di Kota Pontianak sejalan seperti tujuan utama program KOTAKU guna meningkatkan akses warga permukiman kumuh pada infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya perbaikan dan pengembangan berbagai aspek seperti bangunan, lingkungan jalan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pembuangan limbah, ruang terbuka publik dan keselamatan kebakaran. Program KOTAKU sudah dilaksanakan secara baik oleh pihak fasilitator yang berkoordinasi dengan pihak kelurahan, supaya audiensi bersama masyarakat mengenai pemeliharaan Kawasan KOTAKU dapat berjalan secara baik

Kata Kunci: Evaluasi; Program; KOTAKU; Permukiman; Kumuh

Abstract

Management of slum areas, especially in urban areas, is a very important element in management, development and public service efforts. The dominant factors that occur in slum areas include: uncontrolled population growth and lack of effective urban planning. The aim of this research is to evaluate the implementation of the KOTAKU program in Pontianak City. This research method uses a descriptive - qualitative approach with data collection techniques in the form of purposive sampling through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, and data verification. The results of this research show that the evaluation of the implementation of the KOTAKU program in Pontianak City in terms of the 7 indicators that have been analyzed is included in the moderate slum category, and has been good in terms of community participation and relationships between related parties involved in implementing the development of the KOTAKU program. The programs that have been running in Pontianak City are in line with the main objective of the KOTAKU program to increase slum residents' access to basic infrastructure and better public services, especially the improvement and development of various aspects such as buildings, road environments, drinking water supply, environmental drainage, management. wastewater, waste disposal, public open space and fire safety. The KOTAKU program has been implemented well by facilitators who coordinate with sub-district officials, so that hearings with the community regarding maintenance of the KOTAKU area can run well..

Keywords: Evaluation; Program; KOTAKU; Settlement; Slum

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan kawasan pemukiman yang kondisi konstruksi dan lingkungannya tidak sehat, tergolong kumuh, dan seringkali didominasi oleh perumahan yang sangat sederhana dan tidak memadai. Wilayah permukiman masyarakat terdapat bangunan yang rusak atau tidak layak huni, sanitasi yang buruk, dan terbatasnya akses terhadap air bersih. Permukiman kumuh seringkali menjadi rumah bagi kelompok masyarakat kurang beruntung yang tidak memiliki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Penting untuk dipahami kondisi permukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik atau infrastruktur, namun juga terdapat permasalahan ekonomi dan sosial. Sebagaimana dikemukakan (Patiung, 2021) kepadatan bangunan di perkotaan menyebabkan kawasan menjadi tidak layak huni karena pembangunan yang tidak teratur, sarana dan prasarana yang tidak memadai, maka memperburuk permukiman di perkotaan dan menyebabkan kawasan menjadi kumuh.

Adapun penelitian relevan dari (Imas widiyanti, 2018) judul “Implementasi Program KOTAKU Dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di Kricak Yogyakarta”, menjelaskan pelaksanaan dari program KOTAKU serta dampak yang masyarakat setempat rasakan dengan adanya penataan kawasan serta terdapat 7 indikator wilayah itu dikatakan kumuh. Penelitian itu relevan dikarenakan memiliki kesamaan dalam penjelasan 7 indikator wilayah kumuh. Metode penelitian disini ialah deskriptif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan menerapkan teknik clustering. Sedangkan, penelitian relevan lainnya (Fatjriani, M., 2021) berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Jangkung Kec. Tanjung Kabupaten Tabalong (Studi Tentang Pembuatan Drainase Ditinjau Pada Tahap Pelaksanaan)” ini lebih berfokus untuk mengetahui evaluasi program KOTAKU melalui pembuatan drainase dengan melakukan peninjauan pada tahap pelaksanaannya. Metode penelitian di studi ini berdasar pada pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan angket dari 30 informan.

Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) yang diadakan di Kota Pontianak ini berfokus pada pengelolaan permukiman kumuh di perkotaan. Tujuan program ini guna meningkatkan akses penduduk di kawasan permukiman kumuh terhadap infrastruktur dasar dan memberi pelayanan publik yang lebih baik, terkhusus di bidang bangunan, lingkungan jalan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan dan pembuangan air limbah. Hal ini bertujuan guna meningkatkan dan mengembangkan berbagai bidang seperti penanganan material, ruang terbuka umum, dan proteksi kebakaran. Kemudian dalam mencapai tujuan ini, pemerintah bekerja sama dengan mitra non-pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal. Melalui cara ini, program pemerintah akan mencerminkan komitmen untuk mengatasi permukiman kumuh perkotaan dan mendukung pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Pengelolaan permukiman kumuh khususnya di perkotaan ialah unsur penting dan strategis dalam upaya pengelolaan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintah khususnya di Indonesia, tergantung dari penilaian permasalahannya.. Berdasar pada

Pasal 1 Angka 13 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan, “permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni sebab bangunan yang tidak rata, kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan” (Kawasan, 2011). Terdapat 5 kecamatan Pontianak yang dilakukan pelaksanaan dan evaluasi dari program kota tanpa kumuh diantaranya Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Selatan dan Pontianak Kota.

Permukiman kumuh di Kota Pontianak ini seringkali dikarenakan bermacam faktor seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan kurangnya perencanaan kota yang efektif. Permukiman kumuh diperkotaan ini muncul dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat lebih mementingkan kehidupan keseharian mereka dibandingkan pada perbaikan lingkungan tempat mereka tinggal. Ini sejalan seperti studi dari (Sari, 2019) masih terdapat berbagai permasalahan yang memunculkan permukiman kumuh di Kota Pontianak, yakni adanya sanitasi yang buruk dikarenakan pola masyarakat yang masih membuang sampah di sungai (membuang sampah sembarangan) maka pada saat air sungai surut, sampah menumpuk di sekitar permukiman hingga dibawah kolong rumah karena tidak dapat keluar dari permukiman masyarakat. Lalu, keadaan lingkungan yang ada di pinggiran sungai memaksa masyarakat membuang air besar (BAB) langsung ke sungai karena masyarakat yang belum mampu membuat *Septic Tank* dan masyarakat sulit menghindari genangan air di lingkungan itu. Oleh karena itu, kawasan kumuh masih memerlukan intervensi pemerintah dan LSM. Hal ini mungkin melibatkan program guna meningkatkan infrastruktur, akses pada layanan dasar, dan upaya pendidikan dan kesadaran kesehatan lingkungan. Tujuannya ialah guna meningkatkan kualitas hidup penghuni kawasan kumuh dan memberi mereka peluang ekonomi serta akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.

Teori yang dipakai di studi ini, yaitu Teori Efektivitas. Teori ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pada pelaksanaan program KOTAKU dengan melihat 7 indikator wilayah kumuh di Kota Pontianak. Menurut (Saragah dan Ansi, 2020), Efektivitas ialah hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Menurut (Yulia, 2021), efektivitas merupakan ukuran sejauh mana tujuan sudah tercapai saat ini. Oleh karena itu, suatu upaya dapat dikatakan efektif apabila upaya itu optimal dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas menurut (Sanaswanti dan Yulianti, 2020). Efektivitas ialah hubungan dari hasil dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rujukan para ahli itu, bisa dikatakan efektivitas ialah suatu bentuk kegiatan yang ditentukan dan mengarah pada hasil atau pencapaian tujuan yang ideal. Adapun tujuan studi ini yakni guna mengevaluasi pelaksanaan program KOTAKU yang dijalankan oleh Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah di Kalimantan Barat. Ini dilaksanakan guna mengetahui beberapa indikator pelaksanaan program KOTAKU yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif diterapkan di studi ini guna yang dirancang guna menjabarkan konteks implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) secara keseluruhan. Menurut (Sugiyono, 2020), penelitian kualitatif ialah kegiatan deskriptif individu atau kelompok yang didukung dengan analisis SWOT terhadap peristiwa, kegiatan, pola perilaku, dan persepsi. Penelitian kualitatif ini juga bisa dipahami menjadi kegiatan deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif yang berfungsi guna menggali informasi yang ada dari bermacam sumber dan media lain. Tujuan studi ini guna mengevaluasi pelaksanaan program KOTAKU berdasarkan kinerja masing-masing indikator permukiman kumuh yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur lokal dan pusat permukiman di Kalimantan Barat. Adapun teknik pemilihan yang digunakan untuk memilih informan di studi ini ialah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut (Arikunto, 2006) ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak acak maupun acak dengan memperhatikan pertimbangan untuk mencapai suatu tujuan dan fokus pada tujuan itu. Pertimbangan keputusan ini datang dari narasumber yang terlibat dalam pembangunan perumahan (PKP) dan mendukung pelaksanaan program KOTAKU. Penghimpunan data dilaksanakan lewat wawancara dan observasi. Informan dalam wawancara ini melibatkan dua orang yang akan menjelaskan data yang didapat dari wawancara dan observasi berdasarkan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kota Pontianak, perencanaan program KOTAKU ini dilakukan sebelum tahun 2016 dan dilaksanakan mulai tahun 2016 dan diselesaikan pada tahun 2022 dengan target luasan wilayah kumuh sebanyak 10.000 hektar. Pelaksanaan Program KOTAKU ini menetapkan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat, menurut (Diah Indri Sari, 2018) berkaitan dengan beberapa masalah yang berkembang di permukiman, Pemerintah Pusat melalui PP No. 2 Tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam buku Agenda Pembangunan Nasional yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014, mencanangkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini bertujuan guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengatasi permukiman kumuh, mencegah pertumbuhan permukiman kumuh baru, dan mempromosikan penghidupan yang berkelanjutan di kawasan perkotaan. Program KOTAKU bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di daerah kumuh perkotaan, dengan tujuan akhir menciptakan permukiman perkotaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, program mengusulkan merumuskan indikator kinerja dan target pencapaian yang akan berkontribusi pada upaya pengentasan permukiman kumuh perkotaan, termasuk di Kota Pontianak, dengan mengurangi wilayah kumuh yang ada.

Perencanaan program ini dimulai dengan menentukan wilayah yang sesuai 7 (tujuh) indikator wilayah kumuh yang kemudian dilakukan survei bersama masyarakat untuk menentukan luasan wilayah kumuh, dari data-data yang didapat ketika survei maka wilayah kumuh ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yang diantaranya : kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2016 pada Bab III Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, yaitu menjelaskan mengenai Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ialah kriteria yang digunakan guna menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan, permukiman, kriteria itu seperti pada pada ayat (1) yang meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari 1. Keteraturan bangunan; 2. Jalan lingkungan; 3. Drainase lingkungan; 4. Penyediaan Air Minum; 5. Pengelolaan air limbah; 6. Pengelolaan persampahan; dan 7. Pengamanan Kebakaran. Adapun dari 7 kriteria atau indikator yang sudah ditentukan akan dijelaskan sebagai berikut :

Keteraturan Bangunan

Keteraturan pada bangunan ini merupakan indikator yang menilai dari sisi pembangunan gedung di permukiman warga dengan menilai tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan ketidaksesuaian dengan ketentuan rencana tata ruang serta kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Ini sejalan seperti studi dari (Madhianti, 2018) yang menunjukkan kondisi bangunan rumah sebagian besar ialah rumah yang tidak permanen. Keterbatasan kondisi dan lahan yang sangat terbatas mengakibatkan bangunan rumah saling berdekatan tanpa memenuhi standar jarak yang diperlukan, sehingga menyebabkan permukiman menjadi kumuh karena kepadatan bangunan yang tinggi. Adapun penataan ruang bangunan pada wilayah permukiman di Kota Pontianak ini sudah diatur oleh pemerintah daerah, dan dapat dikatakan sudah teratur. Ini sesuai seperti Perda Kota Pontianak No. 11 Tahun 2016 yang melaksanakan terkait perumahan dan kawasan permukiman, dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategis, serta pola – pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Permasalahan terkait keteraturan bangunan yaitu di wilayah permukiman tepian sungai, pembangunan infrastruktur di permukiman tepian sungai masih banyak tidak sesuai struktur bangunan yang kuat dalam kondisi lingkungan sekitar.

Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara melihat kelayakan ruas jalan, jaringan jalan yang tidak melayani seluruh lingkungan permukiman maka tidak memungkinkan untuk jalur evakuasi cepat jika sewaktu – waktu dapat terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, dikarenakan akses jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran serta kualitas akses jalan yang buruk. Pembangunan jalan lingkungan dan drainase sudah dilaksanakan secara baik. Ini seperti studi dari (Maharani, 2020) kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan drainase di Kota Pontianak dilakukan secara baik.

Drainase Lingkungan

Drainase merupakan langkah yang dilakukan guna dapat mengalirkan air akibat curah hujan yang tinggi untuk dapat menghindari adanya banjir di wilayah itu. Maka dibangunlah drainase lingkungan dengan melihat ketersediaan drainase lingkungan yang cukup memadai disekitaran permukiman warga. Pembangunan drainase di Kota Pontianak ini sudah dilakukan secara baik (Maharani, 2020). Kemudian ketika ditemukan tidak adanya drainase yang dapat berfungsi secara baik, maka kawasan itu dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukannya pembangunan program KOTAKU dengan menilai lebih lanjut lagi ke indikator - indikator lainnya.

Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum menjadi suatu indikator karena penyediaan air minum bagi warga setempat sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, minimal kebutuhan air minum setiap individu harus terpenuhi setiap harinya. Pada Program Kotaku untuk air minum berkerjasama dengan PDAM Tirta Khatulistiwa dan untuk saat ini penyediaan air minum maupun air bersih di kota Pontianak sudah baik hampir di setiap kota Pontianak sudah bisa tersedia air bersih di setiap rumah. Namun, di beberapa wilayah di Kota Pontianakan, permasalahan air bersih ini masih harus diperhatikan. (Sari, 2019) mengemukakan permasalahan air bersih ini menjadi kendala keberadaan PDAM di beberapa wilayah di Kota Pontianak maka PDAM masih belum bisa beroperasi secara maksimal. Ini terjadi karena tidak sedikit masyarakat yang menggunakan air sungai Kapuas untuk mandi dan keperluan lainnya, maka masyarakat tidak memikirkan perlu untuk menggunakan PDAM.

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah merupakan upaya yang ditekankan dalam program KOTAKU ini karena air limbah ini salah satu penyebab terjadinya Kawasan kumuh akibat sampah-sampah masyarakat yang gemar membuang sampah di Sungai Kapuas mengakibatkan sampah itu ketika air surut, sampah itu akan menumpuk pada bagian pinggirannya yaitu tepat didekat atau dibawah pemukiman warga, maka jika tidak terdapat pengelolaan air limbah yang baik dan tidak ada pemerhatian khusus dari pemerintah melalui program KOTAKU ini mungkin Kawasan itu dapat dikategori sebagai Kawasan kumuh berat. Selain kumuh, bau menyengat dari sampah itu juga dapat mengganggu Kesehatan warga. Ini seperti studi dari (Sari, 2019) yang menunjukkan adanya selang besar untuk menyalurkan limbah biologis dan kimiawi masih belum berjalan optimal.

Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan merupakan bentuk penilaian yang dilakukan dengan meliputi peninjauan sarana dan prasarana persampahan yang tidak memenuhi syarat teknis serta sistem pengelolaan persampahan. Ini seperti studi dari (Madhianti, 2018) yang menunjukkan masih minimnya tempat pembuangan sampah di beberapa wilayah maka membuat kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke sungai masih sering ditemukan dan hal itu menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Adapun pada program KOTAKU ini, pengelolaan sampah sendiri berkerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup di kota Pontianak.

Pengamanan Kebakaran

Pengamanan kebakaran, sangat perlu tinjauan terlebih pada daerah permukiman padat yang dapat kita ketahui sendiri akses yang sulit bagi kendaraan pemadaman masuk dan melakukan evakuasi secara cepat dan tanggap, maka indikator ini cukup dipertimbangkan dalam pembangunan program KOTAKU, yang meliputi kondisi pengamanan kebakaran, prasarana penanganan kebakaran, sarana proteksi kebakaran. (Sari, 2019) juga menjelaskan salah satu indikator yang menentukan berhasil tidaknya program KOTAKU ialah terkait pengamanan kebakaran. Pada program KOTAKU pemkot Pontianak sudah berkerjasama dan juga memberi fasilitasi kepada para unit pemadam kebakaran untuk berkerja maka dalam menjalankan tugasnya para pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran menghimbau demi berjalannya program KOTAKU ini untuk tidak membakar lahan gambut secara terbuka supaya tidak terjadinya kebakaran lahan yang besar dan merugikan bagi masyarakat di kota Pontianak.

Efektivitas Program

Menurut (Sondang, 2008) Efektivitas ialah pemanfaatan yang merujuk pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini dapat dilihat efektivitas ini mengacu pada hasil dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau tidak. Efektivitas program ini tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai promotor utama program ini, serta peran serta masyarakat yang berkontribusi terhadap keberhasilan proses implementasi pengembangan program KOTAKU.

Keberhasilan program juga memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ini seperti studi dari (Sari, 2019) yang menjelaskan guna meninjau program supaya dapat berjalan secara baik, maka peran Pemerintah baik di tingkat pusat hingga pemerintah setingkat kelurahan sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Pelaksanaan Program KOTAKU sudah menunjukkan efektivitasnya melalui respon positif masyarakat yang memberi dukungan terhadap program serta penghargaan yang diterima oleh program ini menjadi bukti kesuksesannya. Adapun pendirian Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) sesudah pelaksanaan program ini menunjukkan komitmen untuk memantau dan mengawasi kelangsungan program KOTAKU di masa mendatang. Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) yang didorong oleh generasi muda itu sudah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjaga keberlanjutan dari upaya penataan dan pemeliharaan lingkungan, khususnya dalam mengidentifikasi sumber daya yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkreasi dan beraktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan lingkungan, tetapi juga mempromosikan kreativitas dan kemampuan ekonomi masyarakat lokal. Walaupun pada awalnya hanya mendapat sedikit dukungan dan sering diabaikan, kelompok muda yang dipimpin oleh Deni Chandra Irawan (Pengurus KPP Bidang Lingkungan) berhasil membuktikan kemampuan mereka melalui semangat tinggi dan ketegasan serta kerja sama yang solid

antara KPP dan kelompok muda di desa, hal itu berhasil menggerakkan sumber dana yang ada.

Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh KPP terkait rencana aksi pasca-pembangunan yang meliputi kegiatan di sekitar sarana yang sudah dibangun yakni pengembangan hidroponik dan inisiatif lainnya yang berbasis masyarakat dan dikelola oleh KPP. Hal ini menunjukkan kreativitas dan komitmen mereka dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, tugas dan fungsi KPP digunakan sebagai landasan bagi KPP untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program KOTAKU serta menjaga keberlanjutan lingkungan yang sudah diperbaiki. Oleh karena itu, efektivitas program KOTAKU sudah termasuk dalam kategori baik karena kerjasama antar pihak-pihak berlangsung secara baik maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Efisiensi Program

Pada saat pelaksanaan program KOTAKU, pihak Balai Prasarana dan Permukiman mengalami kesulitan dalam memberi pemahaman tujuan program kepada masyarakat karena ketika diberikan pemahaman, masyarakat tampaknya tidak memperhatikan dan merasa tidak adil terhadap program itu, meskipun sudah diketahui dengan jelas dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki serta mengelola pengurangan kawasan kumuh di wilayah itu. Namun, pihak Balai Prasarana dan Permukiman sudah dibantu oleh Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) untuk membantu masyarakat dapat lebih memahami program KOTAKU..

Kolaborasi antara pihak Balai Prasarana dan Permukiman dengan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) membawa harapan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program ini. Melalui kerjasama itu, diharapkan komunikasi antara pihak terkait dan masyarakat bisa diperbaiki serta membuka jalan bagi perkembangan program yang lebih baik ke depannya. Menurut (Lazarus Ramandei, 2023) memaparkan Program KOTAKU memerlukan sifat aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan maka program dapat berhasil. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat menunjukkan program KOTAKU dikelola oleh masyarakat dan dapat memberi manfaat yang optimal.

Pada indikator efisiensi dapat dijelaskan upaya yang dilakukan untuk mendapat hasil yang diinginkan dilihat dari dua aspek, yang pertama yaitu wilayah yang sudah ditangani harus selalu di tinjau ulang guna melakukan pendampingan dan pengawasan maka sarana dan prasarana yang sudah dibangun tidak rusak dan kembali kumuh karena ketidakpedulian masyarakat untuk menjaganya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Sari, 2019) Pemerintah diharapkan mampu mengawasi langsung Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) supaya Program dapat berjalan secara baik. Kemudian kedua yaitu aspek sosial serta perilaku masyarakat dengan memberi pemahaman supaya bisa melestarikan dan mempertahankan lingkungannya.

Respons Masyarakat

Dalam pembentukan program KOTAKU ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam daerah kumuh merasa iri sehingga munculah rasa

kecemburuan sosial dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada wilayah yang memenuhi kriteria program itu, hal ini merupakan respons yang wajar dalam dinamika sosial. (Fajrianti, 2020) menjelaskan untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku ketika seseorang menghadapi suatu rangsangan tertentu..

Reaksi dapat dibedakan menjadi opini (opini) dan sikap. Pendapat dan opini merupakan reaksi jujur terhadap suatu permasalahan yang diungkapkan dengan kata-kata lisan atau tertulis, sedangkan sikap ialah reaksi positif atau negatif terhadap seseorang, objek, atau situasi tertentu. Adapun dalam mengatasi perasaan iri itu, tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan pernyataan terbuka mengenai kriteria pemilihan wilayah, melakukan pendekatan yang melibatkan lebih banyak masyarakat, serta memperluas program ke wilayah lain yang membutuhkan maka hal ini dapat membantu meredakan rasa ketidakadilan yang ada itu. Hal ini bertujuan untuk melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses perbaikan lingkungan dan memastikan semua wilayah mendapat perhatian yang sesuai kebutuhan.

Dinamika yang timbul dalam masyarakat dikatakan oleh bapak Septian Tri Cahyo yang merupakan petugas BKM Siantan Hulu, beliau mengungkapkan ada opini pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait penyaluran bantuan dan fokus program, hal ini mungkin mencerminkan perasaan beragam dari warga terkait adanya pembagian perhatian dan bantuan dari pemerintah. Program Kotaku seyogyanya bertujuan untuk masyarakat yang terdampak ataupun yang berada di lokasi kumuh seperti di pantaran sungai ataupun di pemukiman pinggiran di Kota Pontianak. Oleh karena itu, program Kotaku tidak terdampak bagi masyarakat yang tinggal di tengah - tengah kota.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam menanggapi hal yang dapat menimbulkan pro dan kontra yaitu dengan cara menerangkan sebuah peta yang berisikan wilayah kumuh dan dari peta itu menggambarkan wilayah mana saja yang masuk dalam kriteria kumuh dan yang akan dibangun, peta wilayah kumuh yang di pegang oleh pemerintah juga merupakan hasil dari peta yang dibuat serta diajukan oleh BKM kepada pihak pelaksana program KOTAKU. (Maharani, 2020) juga menjelaskan pada tingkat kelurahan, pelaku yang perannya sangat penting dalam proses pembangunan ialah yakni BKM dan KSM yang terdiri dari masyarakat. BKM dan KSM inilah merupakan aset pembangunan wilayah. Tidak hanya itu, pemerintah kelurahan juga berperan dalam pembangunan yakni memberi jaminan kegiatan Program KOTAKU dapat berjalan dengan lancar khususnya peran kelurahan dalam mendampingi masyarakat.

Pemerintah sudah mengambil langkah untuk mengatasi pro dan kontra dengan cara menyediakan peta yang mengidentifikasi wilayah kumuh, dalam peta itu memberi gambaran jelas mengenai wilayah yang masuk dalam kriteria kumuh dan menunjukkan wilayah mana saja yang akan menjadi fokus pembangunan. Peta wilayah kumuh ini merupakan hasil dari kerja sama antara BKM yang sudah menyusun dan mengajukan

peta itu kepada pihak yang bertanggung jawab dalam program KOTAKU. Langkah ini membantu memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai alasan dan kriteria pemilihan wilayah untuk program pembangunan, dengan menyediakan informasi yang transparan dan terperinci melalui peta wilayah kumuh diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mengapa beberapa wilayah diprioritaskan dalam program itu. Hal ini menjadi langkah awal untuk mengurangi ketidakpastian atau kebingungan yang mungkin timbul di kalangan masyarakat terkait alasan pemilihan wilayah untuk program pembangunan KOTAKU.

Peta wilayah kumuh itu menjadi pedoman serta penguat alasan pemerintah untuk memberi masyarakat pemahaman dalam pembangunan wilayah mana yang pantas untuk dibangun dan yang tidak. Selain kontra itu, terdapat pula juga pro yang terjadi dimasyarakat salah satunya ialah masyarakat merasa senang karena ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan dengan adanya hal itu dapat mempermudah akses mereka dalam menjalankan aktivitas.

Peran masyarakat setempat sangat mempengaruhi dalam mendukung pelaksanaan Program KOTAKU. Walikota Kota Pontianak menjelaskan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi terhadap program-program inovatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Masyarakat berperan dalam pembentukan dan penggerakan BKM di seluruh wilayah kota Pontianak, BKM ini memegang peranan penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, program pengurangan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh dapat terus berlanjut dengan melibatkan seluruh pihak dan masyarakat serta partisipasi yang aktif, semoga program ini dapat terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih besar bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Pemberian penghargaan sebagai penanganan lingkungan terbaik kepada Pemerintah Kota Pontianak atas Program KOTAKU merupakan sebuah pengakuan atas usaha luar biasa yang dilakukan oleh BKM, mereka sudah berperan penting dalam menangani masalah lingkungan terutama dalam mengatasi kawasan-kawasan kumuh di Kota Pontianak. Melalui Program KOTAKU ini, masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam upaya rehabilitasi dan penjangkauan kawasan kumuh, termasuk dalam perbaikan infrastruktur dasar, manajemen air limbah, dan peningkatan aksesibilitas. Penghargaan itu bukan hanya menjadi prestasi bagi Pemerintah Kota Pontianak, tetapi juga menjadi hasil dari kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, hal ini mencerminkan keberhasilan dari kerjasama yang solid. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pontianak mengapresiasi masyarakat yang turut aktif dalam suatu program guna meningkatkan kualitas lingkungan serta upaya dalam penanggulangan permukiman kumuh.

Pada dasarnya program KPP ini menjadi syarat khusus untuk melakukan pemeliharaan program pasca pelaksanaan. Selain itu, inisiatif yang dilakukan oleh program KOTAKU dalam menangani masalah setempat ini biasanya harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah setempat, karena pihak

pemerintah daerah itu mempunyai kewenangan dan kebijakannya sendiri terhadap penanganan masalah di wilayah pimpinannya. Oleh karena itulah, pelaksana program KOTAKU ini hanya bisa melakukan proses identifikasi masalah kumuh, kemudian untuk penanganannya diserahkan kepada stakeholder, seperti : APBD, APBN, APBD Provinsi, serta CSR Perusahaan. Pada dasarnya terkait persampahan ditangani oleh pihak pemerintah Kota karena mereka memiliki perangkat berupa Tim Oranye yang ditugaskan untuk menjadwalkan pengangkutan sampah ke TPA maka dari itu, pelaksanaan program KOTAKU ini lebih efektif dalam penanganan masalah jalan, drainase dan air minum.

Ketepatan Program

Adapun dalam program pemerintah perlu mengumpulkan data melalui Focus Group Discussions (FGD) dengan masyarakat untuk memahami masalah yang dihadapi, dalam hal ini perwakilan masyarakat yang hadir akan memberi keterangan terkait masalah yang mereka alami serta mewakili masyarakat lain untuk memberi keterangan terkait permasalahan rumah-rumah disekitaran mereka yang dibatasi oleh jangkauan lima rumah dari sisi kanan, kiri, depan dan belakang.

Pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pihak pelaksana program KOTAKU ini bertujuan untuk memantau kemajuan program, mendeteksi masalah, evaluasi kinerja, dan perbaikan serta pengambilan keputusan yang terjadi pada beberapa kendala masyarakat. Pengawasan dan monitoring ini juga penting dilakukan untuk memastikan program atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara baik, mencapai tujuan yang diinginkan, serta memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. (Sari, 2019) juga menjelaskan Pemerintah diharapkan mampu mengawasi langsung Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) supaya Program dapat berjalan secara baik Hal itu dimulai pada saat melakukan survei dan pembuatan dokumen perencanaan awal, hal ini dilakukan dengan menugaskan pihak fasilitator kelurahan yang diantaranya ada Senior Fasilitator, Fasilitator Ekonomi, Fasilitator Sosial dan Fasilitator Teknik.

Kemudian pada saat perencanaan, fasilitator-fasilitator itu tergabung menjadi satu untuk membantu masyarakat setempat dalam memastikan keberhasilan 7 indikator perkumuhan dapat terpotret dengan jelas serta dapat diklasifikasikan dalam 3 tingkatan kumuh, seperti: kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap penggunaan dana pelaksanaan program KOTAKU pada dasarnya sudah benar-benar digunakan untuk mengatasi wilayah yang termasuk ke dalam tingkatan kumuh berat. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Balai Prasarana Permukiman setiap akhir tahun ialah dengan membuat perhitungan pengurangan kumuh, sesudah itu baru dapat diartikan dalam mengukur ketepatan program memang harus melalui beberapa tahapan yang dituju guna mendapatkan hasil yang baik.

Upaya yang dilakukan Pemerintah

Supaya Pemerintah dan stakeholder bisa mendapatkan solusi yang terbaik dalam menangani beberapa permasalahan KOTAKU, maka salah satu alat yang digunakan untuk menganalisa ialah dengan analisis SWOT. Analisis SWOT nantinya mampu

mengukur kekuatan dan kelemahan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh pemerinth maupun masyarakat dan kesempatan-kesempatan eksternal serta tantangan-tantangan yang kemudian akan dihadapi. Berdasar pada (Lestari, 2018), SWOT ialah identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi suatu organisasi/lembaga. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Adapun analisis SWOT mengenai program KOTAKU yakni:

Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Pendampingan	Ketersediaan masyarakat
Pelayanan teknis	Kebutuhan masyarakat
Sosialisasi	Kesiapan masyarakat mengelola program
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Pemeliharaan dan perbaikan lingkungan	Pelaksanaan program
Pengawasan dan pengelolaan	Ketersediaan peran pemerintah dan swasta
Pemberdayaan masyarakat	Pengelolaan dana

Sumber: Olah Data Penelitian, 2023

A. Strenghts (Kekuatan) x Opportunities (Peluang)

1. Dibutuhkan adanya pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan guna memberi pemahaman terkait tahapan – tahapan dalam menangani permukiman kumuh.
2. Pelayanan teknis yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui pengawasan dan pengelolaan pada bantuan yang sudah diberikan untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Dalam upaya memberdayakan masyarakat perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, supaya dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi dan situasi dalam menangani permukiman kumuh.

B. Weakness (Kelemahan) x Opportunities (Peluang)

1. Ketersediaan masyarakat yang siap berpartisipasi pada pelaksanaan program akan sangat diperlukan dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan di permukiman kumuh, supaya masyarakat dapat memahami dan berkontribusi penuh dalam menangani permasalahan permukiman kumuh.
2. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu didampingi dengan adanya pengawasan dan pengelolaan yang baik supaya pelaksanaan program untuk menangani permasalahan di permukiman kumuh dapat terlaksana secara baik dan sesuai target pelaksanaan program.
3. Pada saat pelaksanaan program, dibutuhkan kesiapan masyarakat untuk mengelola program secara baik yang didukung melalui pemberdayaan masyarakat dan pembentukan BKM, supaya dapat melibatkan masyarakat dalam menangani permasalahan di permukiman kumuh.

C. Strenghts (Kekuatan) x Threats (Ancaman)

1. Pada saat pelaksanaan program perlu adanya pendampingan, sosialisasi dan pelayanan teknis kepada masyarakat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan ketersediaan peran dari pihak pemerintah maupun swasta.
2. Sosialisasi dan pendampingan harus dilakukan kepada masyarakat, supaya pengelolaan dana yang sudah diberikan dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan.

D. Threats (Ancaman) x Weakness (Kelemahan)

1. Ketersediaan masyarakat yang berupa kelembagaan, dapat membantu pada saat pelaksanaan program dan pengelolaan dana.
2. Ketersediaan peran pemerintah dan swasta harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, supaya pelaksanaan program dapat berjalan secara baik.

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka pemerintah dan *stakeholder* kedepannya akan lebih terbantu dalam mengoptimalkan program KOTAKU yang dilandasi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kemudian Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan akan lebih memperhatikan kelemahan dan ancaman maka dampak negative atau hal-hal yang merugikan lingkungan masyarakat dapat diminimalisir dengan cermat.

KESIMPULAN

Dari data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan evaluasi pelaksanaan program KOTAKU di Kota Pontianak ditinjau dari 7 indikator yang sudah dianalisis sudah termasuk dalam kategori kumuh sedang, dan sudah baik dalam partisipasi masyarakat hingga hubungan antar pihak - pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan program KOTAKU. Adapun program yang sudah berjalan di Kota Pontianak sejalan dengan tujuan utama program KOTAKU guna meningkatkan akses warga permukiman kumuh terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya perbaikan dan pengembangan berbagai aspek seperti bangunan, lingkungan jalan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pembuangan limbah, ruang terbuka publik dan keselamatan kebakaran. Program KOTAKU sudah dilaksanakan secara baik oleh pihak fasilitator yang berkoordinasi dengan pihak kelurahan, supaya audiensi bersama masyarakat mengenai pemeliharaan Kawasan KOTAKU dapat berjalan secara baik. Namun, Pemerintah mengalami kesulitan dalam memberi pemahaman terkait kawasan permukiman kumuh yang akan menjadi target pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial yang muncul dari beberapa oknum masyarakat yang merasa iri. Namun, program KOTAKU tetap berjalan sesuai data dari hasil survei yang sudah ditentukan bersama masyarakat, tanpa menghiraukan oknum-oknum itu. Oleh karena itu, pelaksanaan program KOTAKU ini tetap berjalan dan lebih memfokuskan pada masyarakat pinggiran kota dan ditepian sungai yang lebih terdampak kumuh, tetapi tidak untuk masyarakat yang berada di tengah-tengah kota yang minim wilayah kumuh.

Saran dalam penelitian ini mengacu pada aspek aspek penting indikator yang perlu diperhatikan terhadap penanganan permukiman wilayah kumuh serta peningkatan kualitas pada wilayah kumuh. Pemerintah Kota Pontianak sebagai pemangku kebijakan program KOTAKU diharapkan mampu memberi fasilitas yang lebih lengkap dan lebih

memudahkan masyarakat, terutama seperti memberi tong sampah di setiap sudut supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Tidak hanya itu, selain memberi gerobak sampah, pemerintah juga perlu untuk memberi jadwal, supaya dinas yang bertugas membuang sampah di bank sampah karena kebersihan bebas dari sampah ialah tujuan semua pihak termasuk masyarakat. Maka dari itu peneliti juga berharap masyarakat memiliki kesadaran akan menjaga dan merawat apa yang sudah diberikan dan dipenuhi akan kebutuhan pada wilayah kumuh itu.

DAFTAR PUSTAKA:

- Fajrianti, S. (2020). Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). (*Doctoral dissertation, IAIN Parepare*).
- Lestari, D. (2018). Analisis SWOT dalam pengembangan Real Estate. *Jurnal Teknik Sipil*, 8.
- Madhianti, T. R. (2018). Evaluasi Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat. *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang*, 5(2).
- Maharani, D. J. (2020). Dampak Program Kota Tanpa Kumuh Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat Di Kota Pontianak (Studi Kasus Kecamatan Pontianak Selatan). *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang*, 7(2).
- Patiung, S. (2021). Pola Bermukim Masyarakat Di Kawasan Rawan Bencana BanjiR. (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA*).
- Sari, D. I. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di. *Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik* 8(4).
- Arikunto. (2006). Metode Penelitian Penelitian teknik purposive sampling.
- Fatjriani, M., and J. A. (2021). "Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Studi Tentang Pembuatan Drainase Ditinjau Pada Tahap Pelaksanaan)." *Japb* 4(1): 217–28.
- Fitri, D. A. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia (Sebuah Studi Literatur).
- Imas widiyanti. (2018). Implementasi Program Kotaku Dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di Kricak Yogyakarta. Deskriptif kualitatif Implementasi Program Kotaku sudah berjalan sesuai SE PU No. 40/SE/DC/2016.
- Kawasan. (2011). Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011.
- Sanaswanti dan Yulianti. (2020). Teori Efektifitas "Efektivitas merupakan sebuah hubungan antara hasil dengan tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai."
- Saragah dan Ansi. (2020). Buku Teori Efektifitas.
- Soekanto. (1993). Sosiologi Suatu Pengantar, cet.17, (Jakarta:Raja Grafindo.
- Sondang, P. S. (2008). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: PT Rineka.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif.
- Yulia. (2021). Teori Efektifitas dan management program.